



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2021-2022
Masa Persidangan	: IV
Rapat Ke-	: 8
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Kamis, 7 April 2022
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran Tahun 2021.
Ketua Rapat	: H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung/ Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dra. Hani Yuliasih, M.Si./Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 45 (empat puluh lima) Anggota Komisi II DPR RI dari 50 (lima puluh) Anggota Komisi II DPR RI B. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi C. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara D. Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara E. Kepala Lembaga Administrasi Negara F. Kepala Arsip Nasional RI G. Ketua Ombudsman RI

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Kepala Lembaga Administrasi Negara, Kepala Arsip Nasional RI, dan Ketua Ombudsman RI, dengan agenda evaluasi pelaksanaan program dan anggaran Tahun 2021, pada hari Kamis, 7 April 2022, dibuka pukul 10.07 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pokok-pokok pembahasan pada Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Kepala Lembaga Administrasi Negara, Kepala Arsip Nasional RI, dan Ketua Ombudsman RI, dengan agenda evaluasi pelaksanaan program dan anggaran Tahun 2021, sebagai berikut:

1. Menteri PAN&RB menyampaikan hasil pelaksanaan program dan anggaran tahun 2021 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan&RB), dengan tingkat penyerapan anggaran per 31 Desember 2021 sebesar **Rp199.978.358.000,-** (*seratus sembilan puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah*) dari pagu alokasi anggaran sebesar **Rp202.861.466.000,-** (*dua ratus dua milyar delapan ratus enam puluh satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah*) atau sekitar **98.58%**.
2. Ketua KASN menyampaikan hasil pelaksanaan program dan anggaran tahun 2021 Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dengan tingkat penyerapan anggaran per 31 Desember 2021 sebesar **Rp43.252.363.000,-** (*empat puluh tiga milyar dua ratus lima puluh dua juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah*) dari pagu alokasi anggaran sebesar **Rp44.604.902.000,-** (*empat puluh empat milyar enam ratus empat juta sembilan ratus dua ribu rupiah*) atau sekitar **96.97%**.
3. Kepala BKN menyampaikan hasil pelaksanaan program dan anggaran tahun 2021 Badan Kepegawaian Negara (BKN), dengan tingkat penyerapan anggaran per 31 Desember 2021 sebesar **Rp704.320.385.395,-** (*tujuh ratus empat milyar tiga ratus dua puluh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah*) dari pagu alokasi anggaran sebesar **Rp752.415.051.000,-** (*tujuh ratus lima puluh dua milyar empat ratus lima belas juta lima puluh satu ribu rupiah*) atau sekitar **93.61%**.
4. Kepala LAN menyampaikan hasil pelaksanaan program dan anggaran tahun 2021 Lembaga Administrasi Negara (LAN), dengan tingkat penyerapan anggaran per 31 Desember 2021 sebesar **Rp301.787.243.026,-** (*tiga ratus satu milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tiga ribu dua puluh enam rupiah*) dari pagu alokasi anggaran sebesar **Rp308.446.909.000,-** (*tiga*

ratus delapan milyar empat ratus empat puluh enam juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah) atau sekitar **97.84%**.

5. Kepala ANRI menyampaikan hasil pelaksanaan program dan anggaran tahun 2021 Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), dengan tingkat penyerapan anggaran per 31 Desember 2021 sebesar **Rp234.726.067.648,-** (*dua ratus tiga puluh empat milyar tujuh ratus dua puluh enam juta enam puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah*) dari pagu alokasi anggaran sebesar **Rp245.618.004.000,-** (*dua ratus empat puluh lima milyar enam ratus delapan belas juta empat ribu rupiah*) atau sekitar **95.57%**.
6. Ketua ORI menyampaikan hasil pelaksanaan program dan anggaran tahun 2021 Ombudsman Republik Indonesia (ORI), dengan tingkat penyerapan anggaran per 31 Desember 2021 sebesar **Rp190.773.339.668,-** (*seratus sembilan puluh milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah*) dari pagu alokasi anggaran sebesar **Rp198.162.445.000,-** (*seratus sembilan puluh delapan milyar seratus enam puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah*) atau sekitar **96.27%**.

III. KESIMPULAN RAPAT

Kesimpulan Rapat pada Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Kepala Lembaga Administrasi Negara, Kepala Arsip Nasional RI, dan Ketua Ombudsman RI, dengan agenda evaluasi pelaksanaan program dan anggaran Tahun 2021, sebagai berikut:

1. Komisi II DPR RI dapat menerima hasil pelaksanaan program dan anggaran tahun 2021 yang disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan&RB), dengan tingkat penyerapan anggaran per 31 Desember 2021 sebesar **Rp199.978.358.000,-** (*seratus sembilan puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah*) dari pagu alokasi anggaran sebesar **Rp202.861.466.000,-** (*dua ratus dua milyar delapan ratus enam puluh satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah*) atau sekitar **98.58%**.
2. Komisi II DPR RI dapat menerima hasil pelaksanaan program dan anggaran tahun 2021 yang disampaikan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dengan tingkat penyerapan anggaran per 31

Desember 2021 sebesar **Rp43.252.363.000,-** (*empat puluh tiga milyar dua ratus lima puluh dua juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah*) dari pagu alokasi anggaran sebesar **Rp44.604.902.000,-** (*empat puluh empat milyar enam ratus empat juta sembilan ratus dua ribu rupiah*) atau sekitar **96.97%**.

3. Komisi II DPR RI dapat menerima hasil pelaksanaan program dan anggaran tahun 2021 yang disampaikan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), dengan tingkat penyerapan anggaran per 31 Desember 2021 sebesar **Rp704.320.385.395,-** (*tujuh ratus empat milyar tiga ratus dua puluh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah*) dari pagu alokasi anggaran sebesar **Rp752.415.051.000,-** (*tujuh ratus lima puluh dua milyar empat ratus lima belas juta lima puluh satu ribu rupiah*) atau sekitar **93.61%**.
4. Komisi II DPR RI dapat menerima hasil pelaksanaan program dan anggaran tahun 2021 yang disampaikan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN), dengan tingkat penyerapan anggaran per 31 Desember 2021 sebesar **Rp301.787.243.026,-** (*tiga ratus satu milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tiga ribu dua puluh enam rupiah*) dari pagu alokasi anggaran sebesar **Rp308.446.909.000,-** (*tiga ratus delapan milyar empat ratus empat puluh enam juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah*) atau sekitar **97.84%**.
5. Komisi II DPR RI dapat menerima hasil pelaksanaan program dan anggaran tahun 2021 yang disampaikan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), dengan tingkat penyerapan anggaran per 31 Desember 2021 sebesar **Rp234.726.067.648,-** (*dua ratus tiga puluh empat milyar tujuh ratus dua puluh enam juta enam puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah*) dari pagu alokasi anggaran sebesar **Rp245.618.004.000,-** (*dua ratus empat puluh lima milyar enam ratus delapan belas juta empat ribu rupiah*) atau sekitar **95.57%**.
6. Komisi II DPR RI dapat menerima hasil pelaksanaan program dan anggaran tahun 2021 yang disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI), dengan tingkat penyerapan anggaran per 31 Desember 2021 sebesar **Rp190.773.339.668,-** (*seratus sembilan puluh milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah*) dari pagu alokasi anggaran sebesar **Rp198.162.445.000,-** (*seratus sembilan puluh delapan milyar seratus enam puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah*) atau sekitar **96.27%**.

7. Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian PAN&RB, KASN, BKN, LAN, ANRI, dan ORI untuk menyampaikan jawaban dan tanggapan secara tertulis atas seluruh pertanyaan dari Anggota Komisi II DPR RI pada Rapat Kerja hari ini, dan diserahkan selambat-lambatnya pada tanggal 11 April 2022 melalui Sekretariat Komisi II DPR RI.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 14.45 WIB

Jakarta, 7 APRIL 2022

KETUA RAPAT



H. AHMAD DOLI KURNIA TANJUNG
A-270